



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN BATURRADEN

Jl. Raya Baturraden Km 39 Baturraden 53151  
Tel/Faks. (0281) 681240, email : [baturraden@banyumaskab.go.id](mailto:baturraden@banyumaskab.go.id)  
Website : [baturradenkec.banyumaskab.go.id](http://baturradenkec.banyumaskab.go.id)

## KEPUTUSAN CAMAT BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 017 TAHUN 2023

### TENTANG

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

#### CAMAT BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
  - bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Baturraden selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- j. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- k. Keputusan Camat Baturraden Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumass.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Baturraden  
pada 2 Februari 2023



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG DIKECUALIKAN  
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dindikcapil Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
2	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang berwenang	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Dindikcapil Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
3	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Permintaan dari yang berwenang	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Memberikan kesempatan penilaian harga yang sesuai kemampuan rekanan	Kecamatan Baturraden
4	Dokumen Penawaran Kontrak	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Permintaan dari yang berwenang	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Memberikan kesempatan untuk bersaing secara sehat dan professional	Kecamatan Baturraden

5	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 30	Permintaan dari yang berwenang	Melindungi akses dan keamanan jaringan	Kemanan jaringan akan lebih terjaga	Dinkominfo Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
6	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 1 angka 16	Permintaan dari yang berwenang	Menjaga keamanan jaringan komputer	Kemanan jaringan akan lebih terjaga	Dinkominfo Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
7	Informasi Hasil Pengawasan Kepegawaian yang berkaitan dengan Data Pribadi PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Permintaan dari yang berwenang	Dokumen hasil Wasdal yang berkaitan dengan data pribadi seseorang sifatnya rahasia akan bocor	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
8	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Dokumen yang berkaitan dengan data pribadi seseorang yang sifatnya rahasia akan bocor	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
9	Informasi tentang proses dan hasil kasus sengketa kepegawaian	PP No 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Proses dan hasil sengketa kepegawaian yang bersifat rahasia akan bocor	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
10	a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian	1. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden

	prestasi Pegawai Negeri Sipil b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman					
11	SK Pensiun	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
12	Tata Naskah Pensiun	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
13	Karis, Karsu, Karpeg	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
14	Berkas Mutassi Keluarga	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas



				bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian		Kecamatan Baturraden
15		UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
16		UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan dari yang berwenang, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
17	SK Kenaikan Pangkat PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan adri yang berwenag, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
18	SK Perpindahan dan Mutasi lain-lain	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Permintaan adri yang berwenag, yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	Informasi terkait produk akan bocor, karena produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan, Instansi Pengusul dan Pengelola Kepegawaian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
19	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	BKPSDM Kabupaten Banyumas

	b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil		Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin	Kecamatan Baturraden
20	Dokumen usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j  UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017	Sampai dengan terbitnya SK	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan  Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja  Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	BKPSDM Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden
21	Pengaduan masyarakat :  Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai  Dokumen pengaduan masyarakat	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a  Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati  Atas persetujuan yang bersangkutan  Sampai proses pengaduan selesai	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak  Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  Masyarakat atau karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan  Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang  Sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM  Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan	Dinkominfo Kabupaten Banyumas  Kecamatan Baturraden

				maupun tindakan pelanggaran hukum		
22	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Selama masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Dinkominfo Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
23	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c 2. UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Permanen	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen b. Dapat membahayakan keamanan	Menjaga keamanan data, informasi penanganan konflik social	Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
24	Nama dan alamat data Penyandang Masalah	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf 3 3. UU No 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin 4. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden
25	1. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf 3 3. UU No 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas Kecamatan Baturraden



	<p>3. Data pribadi Bantuan Sosial Tunai</p> <p>4. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD</p> <p>5. Data pribadi penerima PKH</p>	<p>4. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p>	<p>dengan ketentuan peraturanperundangundangan</p>			
26	<p>Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia ® dan konfidential</p>	<p>1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>2. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf 3</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>4. Peraturan Kepala ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Naskah Dinas</p>	<p>Permanen</p>	<p>Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan</p>	<p>Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan</p>	<p>Kecamatan Baturraden</p>
27	<p>Notulen Rapat Rahasia</p>	<p>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p>	<p>Permanen</p>	<p>Membahayakan keamanan</p>	<p>Melindungi informasi rahasiayang dilindungi Undang-undang</p>	<p>Kecamatan Baturraden</p>

